

Telaah Fenomena "Islam Yes, Kafir No" Di Sekolah Dasar Negeri Timuran Yogyakarta Dengan Perspektif Hak Asasi Manusia.

Fransiskus Emanuel¹ Pius Pandor²

1. Program Magister Filsafat STFT Widya Sasana
nataritaboy@gmail.com¹
2. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
piuspandor@gmail.com²

Abstrak

Fokus penelitian ini mau menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia yang dikenal oleh bangsa lain sebagai Bangsa Religius, ternyata masih menyimpan benih-benih intoleransi dan bahkan itu masih terjadi hingga saat ini. Fenomena terkait dengan intoleransi kali ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri Timuran Kota Yogyakarta terkait dengan pengajaran tepuk Islam oleh pembina pramuka kepada anak-anak sekolah dasar. Adapun masalah ini sempat viral beberapa waktu yang lalu dan menuai banyak tanggapan dari netizen dan tentu memberikan dampak negatif terhadap keutuhan di Negara ini yang menganut paham kesatuan. Metodologi yang digunakan dalam penpenelitian ini adalah kualitatif literer dengan meneliti berbagai sumber terkait dengan fenomena yang diteliti. Hasil yang ditampilkan dalam studi ini ialah bahwa pada saat semua orang ingin hidup berdamai sebagai saudara sebangsa dan setanah air, ternyata masih terdapat banyak oknum yang justru hadir dengan menanamkan nilai kebencian dalam diri anak-anak yang justru menjadi cikal bakal pemimpin untuk Bangsa Indonesia kedepannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang bebas berekspresi, namun kebebasan yang terjadi terkait dengan fenomena ini hanya akan menumbulkan persoalan-persoalan baru, secara khusus terkait dengan pemahaman terhadap agama. Kerja sama antar elemen dalam lingkungan sekolah, seperti kepala sekolah, para guru, para siswa dan siswi, orang tua murid dan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan dengan maksud untuk menghindari fenomena-fenomena intoleransi dan segala paham yang salah tidak bertumbuh subur.

Kata Kunci; *Intoleransi, Hak Asasi Manusia, Pancasila, pendidikan.*

Abstract

The primary objective of this research is to elucidate that despite Indonesia being recognized internationally as a predominantly religious nation, it still grapples with the persistence of intolerance, which remains prevalent in contemporary times. This intolerance issue has recently manifested itself at Timuran State Elementary School in Yogyakarta, concerning the teaching of Islamic values by scout leaders to elementary school children. This matter gained widespread attention and generated numerous reactions from online users, ultimately negatively impacting the country's unity-oriented ideology. The methodology used in this research is qualitative literature by examining various sources related to the phenomenon under study. The results shown in this study are that when everyone wants to live in peace as brothers and sisters in their country and country, it turns out that there are still many individuals who are actually present by instilling the value of hatred in children who actually become the forerunners of future leaders for the Indonesian nation. It cannot be denied that everyone is free to express themselves, but the freedom that occurs in connection with this phenomenon will only raise new problems, specifically related to the understanding of religion. To address and mitigate intolerance phenomena and erroneous beliefs, it is crucial to establish collaborative efforts within the school environment, involving key stakeholders such as principals, educators, students, parents, and the surrounding community. This collective endeavor aims to prevent the proliferation of intolerance and promote a more harmonious and inclusive society.

Keywords; *Intolerance, Human Rights, Pancasila, education.*

Submitted: 14 Maret 2023

Revised: 4 Mei 2023

Accepted: 29 November 2023

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara religius. Berbicara tentang agama merupakan sebuah

tindakan yang sangat sensitif. Adapun sensitivitas ini muncul dari berbagai tanggapan *populis* atas suatu persoalan yang ditinjau dari

agama. Selain sebagai negara religius, Indonesia diakui keindahannya karena pluralitas yang dimilikinya. Indonesia menjadi tempat lahir, berkembang, dan hadir seluruh rakyat Indonesia. Namun, bukanlah hal baru apabila pluralitas yang dibanggakan ini justru mengusik kehidupan dan bahkan dilihat sebagai ancaman serius oleh oknum-oknum tertentu. Sebagai hasilnya virus intoleransi mewabah. Perdamaian, persatuan, kesejahteraan umum yang dicita-citakan bersama hanya sebatas ideologi, tetapi dalam praktek oknum-oknum tertentu justru menunjukkan sisi sebaliknya. Ketidaksadaran akan kekayaan yang terkandung di balik semangat pluralitas membuat oknum-oknum tertentu lupa bahwa pluralisme itu menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesadaran (Dewantara, 2015). Ulasan mengenai pluralisme bersinggungan langsung dengan berbagai bidang kehidupan manusia Indonesia, dan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk di dalamnya.

Buya Syafii Maarif dalam harian *Kompas*, yang dikutip Sarbini mengatakan bahwa Indonesia menjadi “lahan yang subur” berkembangnya kelompok-kelompok yang intoleran dan radikal (Sarbini, 2017). Bahkan intoleran ini mewabah hingga ke lingkungan sekolah. Sekolah yang sejatinya menjadi tempat manusia menimba pengetahuan, budi pekerti, dan segala sesuatu yang baik menjadi lahan yang subur juga bagi para penganut intoleran untuk melancarkan aksinya. Salah satunya adalah terkait dengan tepuk Islam yang diajarkan oleh guru atau pembina pramuka yang terjadi di sekolah dasar Negeri Timuran kota Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Kejadian ini sempat menjadi viral dan menuai banyak tanggapan yang menilai bahwa intoleransi justru muncul di daerah yang dikenal mempunyai posisi yang penting dalam menjaga toleransi dan kebhinekaan (Maharani, 2020). Gus Mus dalam sebuah kesempatan yakni dialog Kebangsaan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Selasa, 14 Januari 2020 menyampaikan bahwa sangat ironis ketika seorang pendidik yang dianggap sebagai teladan bagi siswanya justru mengajar konsep

yang salah dan sangat bertentangan dengan prinsip persatuan yang menjadi landasan kuat Bangsa Indonesia. (Riyadi, 2020). Pendidikan sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk sifat-sifat positif dengan menggunakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. (Oetama, 2012) terkait dengan nilai-nilai keindonesiaan yang sangat banyak. Melihat intoleran yang kerap terjadi, terdapat sebuah pertanyaan yang patut direfleksikan oleh seluruh rakyat Indonesia yakni apakah negeri ini akan dibawa ke jurang kehancuran karena orang beragama semakin radikal, intoleran, egoistis dan sektarian (Sarbini, 2017).

Religiusitas sejatinya terdapat dalam kebersatuan, kerja sama dan rekonsiliasi (Riyanto, 2018) artinya bahwa orang yang hidup keagamaannya baik akan mencintai kedamaian, persatuan, kebersamaan dan ini semua muncul dari eksistensi subjek sebagai makhluk religius. Religiusitas dalam konteks Indonesia mengajarkan dan mengajak setiap pengikutnya untuk saling mencintai, menjadi manusia yang baik, hidup damai serta harmonis (Sarbini, 2016). Hidup beragama memang lebih sering dipandang dan dipahami sebagai urusan privat, akan tetapi dalam realitas keseharian dibutuhkan wadah untuk menjamin masyarakat mengekspresikan kebebasan beragamanya (Pinggiran, n.d.) Dari realitas yang terjadi terdapat beberapa pokok persoalan yang akan ditelaah dalam karya ini, yakni Apa latar belakang terjadinya Fenomena ini? Apa dampak yang dihasilkan terkait dengan fenomena ini apa bila dilihat dari Hak Asasi Manusia?

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ini disusun dengan menerapkan metode literatur kualitatif atau studi kepustakaan, dengan dukungan dari berbagai sumber yang relevan terkait dengan topik yang dibahas dalam karya ini. Pendekatan ini melibatkan analisis berbagai literatur, catatan, laporan, dan sumber kepustakaan lain yang berkaitan langsung dengan fenomena

"Tepuk Islam, Yes Kafir, No" yang terjadi dalam kurun waktu yang lalu. (Christiani, 2020; Danandjaja, 2014; Mestika Zed, 2008; Sari & Asmendri, 2018; Zed, 2008). Metode ini memberikan penekanan yang lebih besar pada pengamatan fenomena dan eksplorasi maknanya (Basri, 2014). Penelitian kualitatif berfokus pada proses dan interpretasi hasilnya, dengan perhatian yang terpusat pada unsur manusia, objek, dan institusi, serta hubungan di antara elemen-elemen tersebut dalam usaha memahami sebuah peristiwa, perilaku, atau fenomena. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang "apa (what), mengapa (why), dan bagaimana (how)" terkait dengan suatu fenomena, sebagaimana yang akan kami tunjukkan dalam studi ini (McCuster & Gunayadin, 2015). Tujuan dari menggunakan metode ini adalah untuk mengungkapkan permasalahan yang ada atau status questiones dan memberikan wawasan baru terkait dengan fenomena yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan tinjauan literatur yang relevan dengan fenomena yang dibahas. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis dan digeneralisasikan dengan mengaitkannya dengan teori yang sesuai, menghasilkan hasil penelitian yang dapat memberikan wawasan baru kepada para pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN SEKOLAH DASAR NEGERI TIMURAN

Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan tingkat Sekolah Dasar. Dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar, SD Negeri Timuran adalah bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak tahun 2017, sekolah ini telah mendapatkan akreditasi tingkat A. Lokasi fisik SD Negeri Timuran adalah di Jl. Prawirotoman No. 1 Yogyakarta, Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.

KRONOLOGI TEPUK ISLAM "ISLAM YES KAFIR NO"

Tepuk Islam yang terjadi beberapa waktu yang lalu menambah panjangnya panjangnya daftar kasus intoleransi di bumi Indonesia. Peristiwa ini bermula dari kisah seorang ibu dengan inisial K, yang adalah seorang wali murid di SD Negeri Timuran, Kota Yogyakarta. Dalam berbagai sumber yang kami pelajari, ibu tersebut kaget saat mengetahui salah satu bahan ajar kegiatan pramuka yang didapat anaknya penuh tendensi diskriminasi (Hastanto, 2020). Lebih lanjut, Hastanto menulis bahwa peristiwa ini terjadi pada acara Pramuka yang diadakan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta, Jumat lalu (10/1) di SD Negeri Timuran Kota Yogyakarta. Di mana seorang pembina Pramuka mengajarkan tepuk atau yel-yel yang berbunyi: "Islam, Islam, yes! Kafir, kafir, no!" kepada anak-anak peserta Pramuka. K yang merasa kesal karena anaknya diajarkan doktrin intoleran, langsung melabrak si pembina saat itu juga. Kejadian ini lantas ia curahkan di status *WhatsApp* pribadinya dan jadi perbincangan banyak orang dan kemudian viral di media sosial. Adapun berita ini menuai banyak komentar dari banyak orang.

Berikut adalah kutipan kisah dari pengalaman ibu K "*Pada awalnya, semua orang menyanyikan lagu dengan normal. Kemudian, secara tiba-tiba, salah satu pembina putri datang dan mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk Islam. Saya merasa terkejut karena di akhir dari tepukan tersebut terdapat yel-yel yang berbunyi 'Islam, Islam, yes! Kafir, kafir, no!'. Saya spontan mengungkapkan keberatan saya kepada salah satu pembina senior, mengungkapkan ketidaksetujuan saya terhadap penggunaan tepuk tersebut karena menurut saya hal itu merusak prinsip keberagaman dalam Pramuka"* Peristiwa ini merupakan sebuah fenomena buruk untuk Indonesia yang menjunjung tinggi nilai toleransi, dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa ini.

Masalah intoleransi sebenarnya sering terjadi di berbagai wilayah, tetapi di Yogyakarta, kejadian semacam itu masih kerap muncul, sehingga perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah, dalam menangani masalah tersebut (Rusdi, 2021). Masyarakat bersama pemerintah seharusnya menggunakan Pancasila sebagai pedoman untuk mengatasi masalah intoleransi dalam kehidupan bersama. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat semakin mencintai Indonesia dan pada akhirnya sadar bahwa Indonesia bukan dibentuk dari satu tetapi dari yang beragam.

Intoleransi yang terjadi ini menambah daftar panjangnya kasus intoleransi yang terjadi di Kota Yogyakarta. Rusdi dengan mengutip laporan tahunan Wahid *Institute* menulis demikian terkait dengan berbagai kasus intoleran yang terjadi di Yogyakarta;

Laporan Tahunan 2014 dari Wahid *Institute* menunjukkan bahwa Yogyakarta menduduki peringkat kedua sebagai daerah yang tidak toleran, dengan 21 kasus intoleransi dan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dibandingkan dengan hanya satu kasus pada tahun 2013. Sementara Jawa Barat merupakan urutan teratas dalam daftar peringkat dengan 55 kasus pelanggaran. (Rusdi, 2021).

Persoalan Intoleransi yang terjadi di Yogyakarta menjadi suatu fenomena yang tidak hanya menimbulkan konflik sosial dalam tat hidup bersama sebagai rakyat Indonesia saja tetapi di sisi lain menjadikan Yogyakarta yang dikenal karena slogan “daerah toleran” dan “kota pendidikan” semakin luntur. Ketika berhadapan dengan situasi yang jika dibiarkan akan berbahaya, maka diperlukan penanganan yang cepat terhadap tindakan-tindakan intoleran yang terjadi.

**TANGGAPAN DARI TOKOH
MASYARAKAT TERKAIT DENGAN
FENOMENA INI**

Setelah fenomena tepuk Islam Yes Kafir No terjadi, banyak orang menanggapi peristiwa tersebut, di antaranya adalah para tokoh penting di Indonesia. Mereka adalah:

1. H Hisyam Zamroni

Hisyam Zamroni adalah Pimpinan NU Jepara. Menurut beliau, yel-yel yang diajarkan di salah satu SD dianggap merusak semangat Gerakan Pramuka. Yel-yel tersebut dianggap tidak sejalan dengan semangat Gerakan Pramuka Indonesia karena mencemarkan nama baik orang lain dengan istilah 'no kafir' atau 'kafir no' (Syaiful, 2020). Beliau kemudian menyimpulkan bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasa dharma pramuka. Beliau mengungkapkan bahwa prinsip dasa dharma pramuka pertama adalah mempercayai Tuhan sesuai dengan agama masing-masing anggota pramuka. Prinsip dasa dharma pramuka kedua adalah mendorong anggota Pramuka untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan, kasih sayang, saling hormat, saling menghargai, dan tolong-menolong kepada seluruh manusia tanpa membedakan.

2. Gus Mus

Menurut Gus Mus, seseorang yang mengajarkan yel-yel tersebut kurang memahami agama. Sebabnya, jika mereka memahami agama dengan baik, seharusnya mereka berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan audiensnya. Gus Mus mengatakan, "Janganlah mengajar anak-anak TK seperti mahasiswa perguruan tinggi. Anak-anak kecil sebaiknya tidak diajari hal-hal yang tidak benar" (Wawan, 2020). Dia juga mengkritik penggunaan kata 'kafir' dalam yel-yel yang diajarkan kepada anak-anak, menganggapnya sebagai kesalahan, terutama jika yel-yel tersebut disampaikan dalam konteks kegiatan Pramuka yang menurutnya tidak ada kaitannya. Gus Mus berpendapat bahwa metode pengajaran semacam ini sangat tidak tepat dalam konteks kegiatan Pramuka, dan ia menegaskan bahwa tidak seorang pun dari

rakyat Indonesia seharusnya disebut sebagai 'kafir'.

3. Yenny Wahid

Yenny Wahid memberikan komentarnya dengan bertanya, "Apa yang hendak diajarkan kepada anak-anak kita?" Anak-anak belajar bukan hanya dari teori dalam buku, tetapi juga dari perilaku sehari-hari. Jika tindakan-tindakan atau hal-hal yang memiliki sifat eksklusif terhadap warga negara lain dibiarkan, akhirnya akan menciptakan pemisahan di masyarakat, menciptakan divisi dalam masyarakat," ujarnya. (Luxiana, 2020).

4. Mahmud MD

Mahmud MD mengatakan bahwa (yel-yel) yang diajarkan di lingkungan sekolah ini adalah tindakan yang kemudian merendahkan keberagaman dan keberagamaan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan bahwa yel-yel yang mencakup isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah tidak etis dan seharusnya tidak diajarkan. Beliau juga menyoroti bahwa hal tersebut memiliki potensi untuk merusak persatuan bangsa. Pengajaran yang tidak benar seperti itu akan berdampak negatif terhadap persatuan bangsa ini. (Wawan, 2020).

5. Sri Sultan Hamengku Buwono X

Sultan Hemengku Buwono X, setelah mengetahui bahwa kejadian itu terjadi di daerah Yogyakarta kemudian memberikan komentar terkait dengan peristiwa yang seharusnya tidak terjadi di Yogyakarta. Gubernur DIY dan Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat sangat mengecam tindakan pembina Pramuka yang mengajarkan tepukan dan yel-yel yang meresahkan aspek keagamaan. Sultan, usai acara Dialog Kebangsaan dengan tema 'Merawat Persatuan, Menghargai Kebersamaan', mengungkapkan bahwa ajaran mengenai tepukan Pramuka yang menjadi viral di media adalah tidak pantas. "Sangat disayangkan bahwa hal ini terjadi dalam Pramuka," kata Sultan. Sultan menilai tindakan yang dilakukan oleh instruktur kursus mahir

lanjutan (KML) di SD Timuran Yogyakarta itu adalah tindakan yang tidak sesuai, terutama ketika itu terjadi dalam konteks kegiatan Pramuka dan mencakup yel-yel seperti 'Islam Islam Yes, Kafir Kafir No'. Dari beberapa tanggapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum sejatinya tidak menghendaki hal-hal demikian masih terjadi di negara Indonesia. Negara dengan Pacasila sebagai jiwa bangsanya dengan lima silanya yang diharapkan agar selalu dihidupi dalam ruang publik keseharian sebagai pribadi yang sadar. Ketika video intoleransi ini terjadi diunggah kembali di aplikasi tiktok, terdapat banyak sekali komentar dan penilaian yang diberikan oleh para netizen Indonesia. Banyak dari mereka menyesalkan peristiwa ini justru terjadi di kota Yogyakarta. Kota yang dikenal masyarakat umum sebagai kota toleran dan sekaligus sebagai kota pelajar.

FENOMENA TEPUK ISLAM DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar yang telah diresmikan. Ini menegaskan bahwa negara Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan nasional melalui berbagai peraturan dengan tujuan mencapai kedamaian, kesejahteraan sosial, keadilan, persatuan dalam kehidupan bersama. Namun, dalam kenyataannya, implementasi hukum belum mencerminkan situasi yang diharapkan.

Apabila kita mengulas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), HAM secara sederhana merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan bahwa hak-hak asasi manusia adalah dasar kehidupan manusia dan merupakan standar umum keberhasilan bagi seluruh bangsa (Laurensius Arliman S, 2016). Perlindungan terhadap HAM telah diimplementasikan dalam peraturan hukum nasional di berbagai negara,

serta diatur dalam peraturan hukum internasional. Bahkan, perhatian terhadap HAM juga diwujudkan dalam undang-undang. Prinsip kedua dalam Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab," juga mencerminkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam tata kehidupan. merupakan pengakuan bahwa martabat manusia dijunjung tinggi di negara Indonesia, dan karena itu tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena, artinya tidak adil dan tidak beradab (Widharsana, 2018). Ketika kita membahas sila kedua dalam Pancasila, isinya meliputi beragam aspek, tetapi fokus utamanya adalah pada masalah menghormati dan mempertahankan hak asasi manusia. Pernyataan mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pancasila mengandung keyakinan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sejak awal manusia muncul di dunia, mereka memiliki dua dimensi yang membentuk eksistensinya sebagai individu yang lengkap, yaitu dimensi pribadi dan dimensi sosial. Oleh karena itu, hak-hak individu dibatasi oleh hak asasi individu lainnya. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kebebasan adalah salah satu poin dari hak asasi pribadi, tetapi apabila tidak dibatasi, maka akan fenomena tepuk Islam yes kafir no adalah sebuah kesalahan yang menjadi pepadangan biasa dalam ruang lingkup keberagaman Indonesia. Kebebebasan yang terukur ini menjadi kewajiban dan tentunya harus diketahui dan disadari oleh seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia (Supriyanto, 2014). Hal ini dilakukan tidak lain ialah untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Lebih lanjut Widharsana menulis bahwa dalam Konstitusi Indonesia tahun 1945, hak-hak asasi manusia diatur dalam pasal 27-31. Pasal-pasal ini mencerminkan hak-hak individu, ekonomi, politik, persamaan hukum, sosial budaya, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam proses peradilan, dan

perlindungan hukum. Deklarasi universal HAM PBB menguraikan poin-poin yang mau disampaikan terkait dengan Ham yang kemudian oleh Indonesia diatur secara resmi dalam UUD 1945, misalnya: Hak Asasi Pribadi yang termasuk dalam kategori ini mencakup:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk membentuk keluarga
3. Hak untuk kebebasan bergerak, berpergian, dan berpindah tempat
4. Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat
5. Hak untuk bergabung dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan
6. Hak untuk kebebasan hati nurani, memilih, menjalankan agama, atau kepercayaan pribadi
7. Hak untuk berkomunikasi dan mengakses informasi.

Adapun setiap pasal yang ditetapkan terkait dengan hak-hak dijabarkan dalam poin-poin. Penjelasan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan manusia, sehingga tujuan bersama dapat direalisasikan. Fenomena tepuk Islam yang terjadi beberapa saat yang lalu ini tentunya mengarah pada ajaran yang kurang beradab. Memang seseorang memiliki hak kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat, tetapi selanjutnya yang perlu dilihat adalah nilai moral yang terkandung dari apa yang diucapkan. Tepuk Islam yang bernapaskan intoleransi ini sejatinya sudah salah. Manusia di dalam eksistensinya sebagai makhluk sosial membantu komunitas yang memiliki sistem atau tata aturan bersama dengan maksud mengejar kebaikan atau kesejahteraan tertinggi. Namun, tak dapat disangkal bahwa dalam kebersamaan sebagai warga negara, muncul oknum-oknum tertentu yang tidak berpegang pada *rational part*-nya ingin memporakporandakan kesejahteraan yang telah tercipta dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tindakan yang mengarah pada intoleransi menjadi salah satu penyebab atau indikasi menyebarnya paham yang eksklusif dalam sebuah tatanan sosial yang

majemuk, secara khusus untuk Indonesia. Intoleransi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal melibatkan aspek-aspek seperti psikologis, dendam politik, sejarah, pendidikan, pemikiran, dan ekonomi. Sementara faktor eksternal melibatkan realitas keberagaman yang merupakan karakteristik Indonesia.

Pengajaran tepuk Islam yes, kafir no, oleh pembina pramuka secara langsung menyadarkan manusia Indonesia yang sadar bahwa telah terjadi penyusupan pemahaman intoleran di lingkungan sekolah. Fenomena ini menjadi sebuah fakta yang ironis dalam pendidikan di negeri ini. Pendidikan seharusnya berfungsi sebagai lingkungan di mana pengetahuan dapat ditemukan, tetapi sekarang harus menerima pengajaran yang memiliki potensi merusak keberagaman bangsa ini. (Saputra & Mubin, 2021). Kejadian ini menjadi sebuah masalah yang serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Secara lebih lanjut, Saputra dan Mubin menulis bahwa banyaknya faktor yang mempengaruhi menjamurnya paham intoleran di negeri ini dan lebih mirisnya ialah justru terjadi di lingkungan sekolah. Dalam konteks keberagaman, diperlukan sistem yang mengatur untuk mencegah secara proaktif tindakan yang mungkin memiliki dampak negatif pada masa depan pendidikan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki kultur nilai-nilai yang begitu menghormati dan menghargai manusia yang digali-dari nilai-nilai yang dihidupi bersama. Hal ini telah dibuktikan melalui sejarah yang panjang. Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang dijabarkan dalam poin-poin Pancasila.

INTOLERANSI AKAR RADIKALISME

Aksi pengajaran tepuk Islam tersebut mengarah pada radikalisme, di mana anak-anak justru telah menerima ilmu yang salah sejak dini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme memiliki tiga makna, yaitu paham atau aliran yang sangat ekstrem dalam politik, paham atau aliran yang ingin mencapai perubahan atau pembaharuan sosial politik melalui kekerasan, dan sikap yang sangat ekstrim dalam konteks aliran politik. Di Indonesia, meningkatnya radikalisme

keagamaan berkaitan dengan peningkatan beragam penafsiran, pemahaman, aliran, dan bahkan sekte dalam suatu agama tertentu.

Penganut radikalisme pasti akan memanfaatkan berbagai alat atau saluran komunikasi untuk menyebarkan pandangan yang keliru kepada masyarakat. Menurut kami, tindakan yang dilakukan pembina pramuka ini mengarah kepada paham radikalisme. Dalam sebuah pengakuan seseorang yang kami kutib dari *Detik.com*, berikut adalah kutipannya;

Ditemukan bahwa yel-yel anti-kafir tidak hanya terjadi di lingkungan pramuka, tapi juga di Bantul, praktik intoleransi telah berlangsung sejak lama di beberapa tempat belajar Al-Quran. Untuk memverifikasi hal ini, VICE berbicara dengan Okta, seorang warga Bantul berusia 26 tahun yang saat ini aktif membantu mengajar di beberapa taman pendidikan Al-Quran di Bantul. Okta mengungkapkan bahwa saat dia masih SD, yel-yel di TPA-nya sudah mencakup kata 'Kafir, kafir, no' setelah 'Islam, Islam, yes'. Ia tidak tahu siapa yang menambahkan kata tersebut, dan yel-yel semacam itu sering digunakan saat acara pertemuan antara santri dari berbagai tempat di Bantul. Okta juga menyatakan bahwa orang tua peserta TPA dan para santri mengetahui tentang yel-yel ini karena mereka sering menghadiri pertemuan santri. Sampai saat ini, Okta belum mendengar ada protes dari orang tua seperti yang terjadi pada orang tua peserta Pramuka di SD Negeri Timuran (Hastanto, 2020).

Dari pengakuan tersebut dapat diketahui bahwa yel-yel atau tepuk Islam ini sudah lama diajarkan, bahkan ketika ia masih menjadi siswa sekolah dasar tetapi baru diketahui secara publik dan dinilai salah ketika video terkait fenomena ini viral di media sosial. Hal ini mau menyatakan bahwa pengajaran tentang intoleransi, radikalisme “mungkin saja” masih terjadi di lingkungan sosial tertentu. Tidak mengherankan apabila kemudian muncul banyak ormas yang menekankan paham radikal dalam kehidupan mereka sehingga

mengakibatkan banyak kekacauan yang terjadi. Realitas yang sudah menjadi pemandangan biasa ini tidak lagi sejalan dengan cita-cita dari bangsa ini. Banyak orang menginginkan adanya kesejahteraan umum, kedamaian, keadilan yang sejalan dengan Pancasila dipatahkan akibat muncul banyaknya kasus yang mencoreng wajah Indonesia sendiri. Pancasila seakan-akan terhempas, bahkan tidak disegani lagi (Dewantara, 2021).

WAJAH PENDIDIKAN INDONESIA

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka. Selain itu, tujuan pendidikan adalah memberikan peserta didik bekal agar mereka memiliki kemampuan yang berguna dalam keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, negara, dan bangsa. Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini telah merusak citra pendidikan di Indonesia. Kita telah menyaksikan banyak kasus intoleransi yang terjadi di lingkungan sekolah dalam sejarah kita. Tempat yang semestinya menjadi sarana untuk mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral yang baik, didukung oleh pengetahuan, malah menjadi tempat dimana sebagian individu tertentu menanamkan sikap intoleransi.

Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan oleh Sri Soryani, ia menulis demikian;

Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan pendidikan, memiliki tujuan untuk membentuk dasar bagi pengembangan potensi peserta didik agar mereka dapat menjadi individu yang: 1) memiliki keyakinan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika baik, dan memiliki kepribadian yang terpuji, 2) berpengetahuan, memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, 3) sehat, mandiri, serta memiliki rasa percaya diri, dan 4) toleran, peduli terhadap masyarakat, mendukung prinsip demokrasi, dan bertanggung jawab. (Soryani, 2015).

Dari pernyataan Sri yang mengutip peraturan pemerintah di atas dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan di negara ini tidak hanya mengedepankan aspek kognitif atau intelektualnya saja tetapi menyentuh aspek sikap dan psikomotornya juga. Artinya pendidikan yang diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia menyentuh kemanusiaan seseorang secara utuh, dengan maksud agar mereka yang dididik bisa memanusiakan sesamanya di manapun dia berada tanpa harus ada yang mengingatkannya. Hal ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa setiap rakyat akhirnya sadar dan mau menjalankan hidupnya dengan tahu dan mau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Guru memiliki peran yang penting dalam menciptakan sistem pengajaran yang nyaman bagi semua siswa siswi tanpa memandang latar belakang mereka, sehingga segala sesuatu yang tidak baik dapat ditangkal sejak dini. Pern guru diatur dalam undang-undang No. 14 tahun 2005 yang berbunyi “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mengajar, mendidik, mengarahkan, melatih, menilahi dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal (*Undang-Undang-Nomor-14-Tahun-2005.Pdf*, n.d.).

Peraturan perundang-undangan ini dilandaskan pada pertimbangan bahwa,

Seorang guru adalah seorang pendidik yang memiliki tugas pokok untuk mendidik, mengajar, membimbing, memberikan arahan, melatih, melakukan penilaian, dan mengevaluasi peserta didik dalam konteks pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara itu, seorang profesional adalah seseorang yang melakukan pekerjaan atau aktivitas yang merupakan sumber penghasilan hidupnya, dan kegiatan ini memerlukan keahlian, keterampilan, atau kompetensi yang memenuhi standar kualitas atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesional sesuai dengan definisi yang tercantum dalam undang-undang, yaitu Pasal 1 Nomor 1 dan 4.

Proses bimbingan dan pengarahan yang dialami peserta didik akan berbeda-beda, tergantung dari perbedaan usia. Dalam hal ini peserta didik usia sekolah dasar memiliki karakteristik, perkembangan fisik, psikologi yang berbeda, kebiasaan dan daya tangkap yang berbeda (Sundari, 2017). Peran Guru bagi anak Sekolah dasar akan sangat berpengaruh untuk perkembangan mereka selanjutnya. Faktanya anak sekolah dasar, akan menerima setiap pengajaran sebagai sebuah kebenaran apabila diajarkan oleh Guru.

EKSISTENSI PRAMUKA DEWASA INI

Iswi Sholilihah dalam tulisan “kegiatan kepramukaan dalam meningkatkan toleransi beragama siswa sekolah dasar” menyatakan bahwa kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan di sekolah yang bisa menanamkan sikap toleransi siswa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berfungsi menyiapkan generasi penerus bangsa. Sekolah menjadi lembaga publik yang sangat tepat untuk menjelaskan apa makna dan pentingnya kemajemukan dan tenggang rasa antar sesama, ini karena di sekolahlah pola pikir sekaligus pola interaksi anak yang tidak seragam (heterogen) itu mulai hadir dan terbentuk (Sholilihah, 2018). Kegiatan pramuka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan dalam menyiapkan anak bangsa menjadi kader bangsa yang berkualitas baik secara moral, mental, emosional, maupun fisik dan keterampilan (Kemendikbud, 2014).

SIMPULAN

Intoleransi yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi masalah serius untuk ditanggapi oleh rakyat Indonesia. Sekolah sejatinya menjadi tempat belajar siswa-siswi tentang ilmu pengetahuan dan budi pekerti harus benar-benar ditunjukkan eksistensinya dan maksud dari berdirinya sekolah-sekolah. Hal ini dimaksudkan agar sekolah tetap menjadi tempat yang aman bagi semua *civitas akademika* dalam komunitas sekolah, baik itu sekolah swasta yang berbasis religi, maupun

sekolah pemerintah. Kerja sama antar elemen dalam lingkungan sekolah, seperti kepala sekolah, para guru, para siswa dan siswi, orang tua murid dan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan dengan maksud untuk menghindari fenomena-fenomena intoleransi dan segala paham yang salah tidak bertumbuh subur.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2014). Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda. *Journal of US-China Public Administration*, 11(10), 831–838. <https://doi.org/10.17265/1548-6591/2014.10.003>
- Christiani, L. (2020). Preservasi, Konservasi dan Restorasi Dokumen di Rekso Pustaka. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 4(3).
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*, 0(52). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Dewantara, A. W. (2021). Pancasila Dan Multikulturalisme. *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 10(1), 109–126. <https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i1.8402>
- Hastanto, I. (2020). *Yel “Islam Yes, Kafir No” Terlanjur Diajarkan di Banyak Sekolah Sejak Puluhan Tahun lalu*. <https://www.vice.com/id/article/z3bxaj/yel-islam-yes-kafir-no-pramuka-yogyakarta-diajarkan-sekolah-sejak-puluhan-tahun-lalu>
- Kemendikbud. (2014). *Kepramukaan “Bahan Ajar Implementasi Kurikulum 2013*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan penjaminan Mutu Pendidikan.
- Laurensius Arliman S. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Doctrinal*, 1(2).
- Luxiana, K. M. (2020). *Yenny Wahid soal Tepuk “No Kafir” : Apa Sih yang Mau*

- Diajar*?
- <https://news.detik.com/berita/d-4862075/yenny-wahid-soal-tepuk-no-kafir-apa-sih-yang-mau-diajarin>
- McCuster, K., & Gunayadin. (2015). *Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and choice Based on the Research*.
- Mestika Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. *Yayasan Obor Indonesia*.
- Rusdi, M. (2021). Penanganan intoleransi oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 129–145. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.266>
- Saputra, M. N. A., & Mubin, M. N. (2021). *URGENSI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM FENOMENA RADIKALISME DI INDONESIA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 3(1), 16–28.
- Sarbini, P. B. (2018). Mengkritisi dan Meluruskan Pandangan tentang Kafir. *Seri Filsafat Teologi*, 28(27), 72–80.
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1).
- Sholilihah, I. (2018). Keiatan Kepramukaan Dalam Meningkatkan Toleransi Beragam Siswa Sekolah Dasar. *עלון הגטע*, 66, 37–39. https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf
- Soryani, S. (2015). PENANAMAN SIKAP TOLERANSI DI KELAS V SD NEGERI SIYONO III KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Sundari, F. (2017). Peran Guru Sebagai Pembelajar dalam Memotivasi Peserta Didik Usia SD. *Prosiding Diskusi Panel Pendidikan, April*, 60–76.
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Syaiful, M. (2020). *Tepuk “Islam Yes Kafir No” Cederai Gerakan Pramuka*. <https://www.nu.or.id/daerah/tepuk-Islam-yes-kafir-no-cederai-gerakan-pramuka-HheLQ>
- Undang-Undang-Nomor-14-Tahun-2005.pdf*. (n.d.).
- Wawan, H. J. (2020). *Gus Mus Bicara Soal Tepuk Pramuka “No Kafir” di Yogya: Wong Mendem!* <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4858524/gus-mus-bicara-soal-tepuk-pramuka-no-kafir-di-yogya-wong-mendem>.
- Wawan, H. J. (2022). *Mahfud Soal Tepuk Pramuka “No Kafir” di Yogya: Rendahkan Keberagaman*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4858570/mahfud-soal-tepuk-pramuka-no-kafir-di-yogya-rendahkan-keberagaman>
- Widharsana, P. D. (2018). *Mengamalkan Pancasila Dalam Terang Iman Katolik* (Widiantoro (Ed.)). Kanisius.
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. *Yayasan Obor Indonesia*.